

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2019). Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu, bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu (Soekanto, 2019).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2018). Dalam tiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Penekanan pada teori peran sifat individu dalam perilakunya di masyarakat disinkronkan dengan posisi yang diduduki (Solomon et al., 2015). (Harijanto dkk. 2013) mencerminkan konsep teori peran posisi rata-rata individu masyarakat dalam suatu sistem sosial yang memiliki Hubungan antara hak dan kewajiban dan kekuasaan serta tanggung jawab. Setiap orang memiliki peran, dan keluarga, pekerjaan dan lingkungan sosial, di mana ia berperilaku di masing-masing peran ini Jika tidak. Misalnya, pekerja bekerja Bisa ada lebih dari satu orang di perusahaan satu, sebagai bagian dari perusahaan,

Anggota serikat atau ketika itu komite keselamatan Interaksi sosial memegang peranan penting. dalam sebagai identitas interpretative Identitas dan siapa yang bisa bertindak sekarang. Hasilnya adalah, Apa profesi yang mendefinisikan seseorang, Mereka diharapkan berperilaku social dengan

perannya masing-masing. Menurut (Agustina, 2019), peran stres atau Tekanan silinder pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana peran juga terpengaruh keinginan orang lain, untuk Transisi bisa tidak pasti dan sulit. Hal Ini memperumit peran tidak jelas, kontradiktif, atau sulit diadaptasi mengharapkan. Ada tiga jenis stres peran: konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan peran (Fogarty, et al., 2018).

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran, teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu :

1. Orang-orang yang menjadi bagian dalam interaksi tersebut
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Dalam kata lain perilaku peran adalah perilaku aktual seseorang yang memerankan suatu peran, dan yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Perilaku peran bisa jadi berbeda dari perilaku yang diharapkan. Sebab antara seseorang dengan orang lainnya tidaklah sama dalam cara memandang peran, sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan melaksanakan perannya. Disamping itu tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, sehingga tidak akan ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama

2.2 Teori Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses yang memungkinkan individu untuk mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, serta perilaku yang ada dalam sistem politik suatu masyarakat. Menurut Almond dan Sidney (2013), sosialisasi politik adalah proses dalam kehidupan sosial di mana individu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Proses ini dimulai sejak individu masih muda dan berlanjut sepanjang

hidup mereka. Dalam konteks pendidikan, sekolah berperan penting sebagai agen sosialisasi politik yang mengarahkan pembentukan pandangan politik siswa.

Pentingnya sosialisasi politik di sekolah tidak hanya terletak pada pemberian informasi mengenai politik, tetapi juga dalam pembentukan sikap kritis terhadap isu-isu sosial dan politik yang ada. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran, diskusi, dan pengajaran mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi dalam kehidupan politik, siswa dapat memahami dan menyaring informasi yang ada untuk membentuk pandangan yang lebih matang terhadap dunia politik.

Sosialisasi politik pada dasarnya merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Beberapa ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa. Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.

Sosialisasi politik membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga dapat merubah kebudayaan politik, yaitu bila sosialisasi itu menyebabkan penduduk, atau sebagian penduduk, melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain (Mas'ud, 2019).

Sosialisasi politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung

jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi politik merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik (Raga, 2017).

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga yang disebut sebagai agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik tersebut terdiri dari beberapa individu atau kelompok baik dari segi politik maupun nonpolitik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran politik terhadap seseorang terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung.

Almond (2018) menyatakan bahwa pola kekuasaan nonpolitik yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap politik adalah pola di dalam keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Menurut Apter (2019) menyatakan bahwa Penjelasan-penjelasan psikokultural mengenai sosialisasi di awal masa kanak-kanak dengan pilihan-pilihan orang tua, menunjukkan bagaimana sosialisasi awal diperkuat oleh teman-teman sebaya di sekolah, dan oleh kelompok-kelompok acuan lain. Pengalaman mengambil tindakan politik, dari hal memberikan suara hingga mencalonkan diri, dibangun di atas pola-pola sosialisasi awal dan memberikan kesempatan untuk proses belajar masyarakat baru.

Kebanyakan peneliti sependapat bahwa keluarga dan sekolah adalah agen yang paling penting dalam sosialisasi politik, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai yang lebih penting antara keluarga atau sekolah sebagai agen sosialisasi politik (Kweit, 2016). Selain itu, dua faktor lainnya yang sering dikemukakan mempunyai pengaruh penting terhadap proses belajar politik yaitu kelompok pengawas dan media. Jadi, agen-agen utama sosialisasi adalah keluarga, sekolah, media, dan kelompok pengawas (Kweit, 2018).

Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem

politik karena dengan adanya sosialisasi politik maka seorang dapat mengambil pelajaran dari suatu proses pembelajaran politik yang dia alami atau yang dia rasakan. Menurut Kweit (2018) bahwa secara umum, sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses melalui mana individu belajar tentang politik. Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan seseorang kepada suatu situasi lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan yang dapat ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menentukan suatu interaksi pengalaman serta kepribadianya (Rush dkk, 2017).

Efriza (2017) berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai politik yang melekat pada setiap individu tersebut akan berbeda. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses terhadap individu-individu sampai pada kadar yang berbeda, salah satunya bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu partisipasi politik.

Menurut Efriza (2017) bahwa isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh seorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat adalah informasi politik, Pemberian keyakinan dan kepercayaan terhadap politik, pengetahuan politik, Provokasi atau propaganda politik. Maka yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses seseorang mendapatkan pengalaman atau pendidikan politik dari orang lain, atau kelompok masyarakat, sehingga dapat membentuk sikap atau orientasi keterkaitannya terhadap politik tertentu dalam kehidupan politik yang berlangsung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan sosialisasi politik dalam penelitian ini adalah proses dimana seseorang dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungannya yang diperoleh dari individu atau kelompok lain baik secara disadari ataupun tidak disadari terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang

berlangsung.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu (Ramlan, 2018):

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran tentang politik pemerintahan yang terjadi antara pemberi materi dan penerima materi. Adanya pendidikan politik, masyarakat akan mengetahui nilai, norma, dan simbol-simbol politik yang ada di negaranya. Tujuan pendidikan politik adalah untuk membangun kesadaran, pendapat, pemahaman serta perilaku seseorang untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik. Pemberi materi dalam proses pendidikan politik dilakukan oleh pemerintah, partai politik maupun sekolah. Kegiatan tersebut dalam bentuk kursus, latihan kepemimpinan, diskusi maupun dalam forum partai politik.

2. Indoktrinasi Politik

Indoktrinasi politik ialah proses memobilisasi masyarakat untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi. Indoktrinasi yaitu pemerintah yang mengontrol pandangan politik masyarakatnya. Partai politik dalam sistem politik sangatlah totaliter dalam melaksanakan fungsi indoktrinasi politik

Sosialisasi politik merupakan kunci untuk memahami sistem politik, maka sosialisasi politik berfungsi untuk menentukan arah partisipasi politik masyarakat. Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff adalah melatih individu dalam memahami nilai-nilai politik dan memelihara sistem politik yang berlaku. Fungsi sosialisasi politik pada umumnya, antara lain (Rush dan Althoff,):

1. Menanamkan nilai-nilai dan norma-norma pada masyarakat.
2. Mengenalkan visi dan misi partai politik pada masyarakat.
3. Memperkaya pengetahuan, pemahaman, serta pengkhayatan rakyat dalam perpolitikan.
4. Mengenalkan rencana-rencana/program pemerintah kepada rakyat sebelum

menjadi kebijakan/keputusan.

5. Meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
6. Meningkatkan keterlibatan rakyat dalam pemerintah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik berfungsi untuk membangun masyarakat yang paham dan berpengetahuan akan politik, mengajarkan nilai-nilai yang ada dipolitik, sebagai informasi, instruksi, dan persuasi. Dengan begitu, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada di pemerintahan

2.3 Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat dilakukan di beberapa macam sarana yang disebut sebagai agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik tersebut terdiri dari beberapa individu atau kelompok baik dari segi politik maupun nonpolitik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran politik terhadap seseorang terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung.

Almond dan Verba (2018) mengatakan bahwa pola kekuasaan nonpolitik yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap politik adalah pola di dalam keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Apter (2016) menjelaskan bahwa penjelasanpenjelasan psikokultural mengenai sosialisasi di awal masa kanak-kanak dengan pilihan-pilihan orang tua, menunjukkan bagaimana sosialisasi awal diperkuat oleh teman-teman sebaya di sekolah, dan oleh kelompok-kelompok acuan lain. Pengalaman mengambil tindakan politik, dari hal memberikan suara hingga mencalonkan diri, dibangun di atas pola-pola sosialisasi awal dan memberikan kesempatan untuk proses belajar masyarakat baru. Berdasrkan penjelasan tersebut, makan agen sosialisasi politik yang sangat berperan dalam menentukan sikap politik seseorang dari masa kanak-kanak hingga tumbuh dewasa adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.

Menurut Rush dkk 2017) agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama,

kelompokkelompok senggang, dan media massa. Proses sosialisasi politik dilakukan mulai dari bagian terdekat yaitu keluarga sampai dengan yang dilakukan oleh media massa cetak maupun elektronik yang mempengaruhi seseorang mulai dari kanak-kanan hingga mencapai umur yang matang yaitu dewasa, selalu berlangsung secara sengaja maupun tidak. Agen sosialisasi politik menurut terdiri dari 6 jenis, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Jika diasumsikan usia pemilih pemula yaitu 17-21 tahun maka status pemilih pemula juga bisa terdiri dari mahasiswa ataupun pekerja muda sehingga agen sosialisasinya termasuk kampus atau tempat kerja (Efriza, 2015).

Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya (Sahid, 2019). Maka dapat dikatakan bahwa, sarana sosialisasi politik yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi sikap atau orientasi politik pemilih pemula adalah keluarga dan sekolah. Selain itu juga ada sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik yang berperan, diantaranya teman sebaya, media massa, kelompok profesi/kerja, kelompok agama, dan kontak-kontak politik langsung.

2.4 Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Partisipasi politik (Budiharjo, 2001) adalah suatu kegiatan dari warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun secara kelompok secara spontan maupun dimobilisasi.

Menurut Rahman (2017) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti

memilih pimpinan negara atau upayaupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan seseorang dalam politik untuk menentukan sikap dukungan atau penolakan dalam system pemerintahan.

Menurut Maran (2018) bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Rush (2017) bahwa dalam partisipasi politik dapat ditinjau sampai sejauh mana dan sampai tingkat apa individu terlibat dalam sistem politik. Miriam Budiardjo (2018), melihat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, memengaruhi kebijakankebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan-kegiatan yang semacam ini dapat terlihat dari kegiatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghindari rapat-rapat umum (Kampanye), menjadi anggota suatu partai politik atau sekelompok kepentingan ataupun mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah atauoun juga bisa anggota parlemen dan sebagainya sejenis dengan itu. Bentuk partisipasi politik seseorang dapat terlihat melalui indikator keikutsertaannya memilih pada pemilu baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Namun, kegiatan pemberian suara ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Menurut Maran (2018) bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Lebih lanjut, (Rush dkk, 2017) membagi bentuk partisipasi politik yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan-jabatan politik atau administratif.
- b. Mencari jabatan politik atau administratif.
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.

- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik.
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal.
- i. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting).

Rahman (2017) membagi partisipasi politik ke dalam dua kelompok besar, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional terdiri dari pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan mengadakan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional seperti mengajukan petisi, berdemonstrasi, melakukan konfrontasi, mogok, melakukan tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), dan tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan).

Diperkuat lagi oleh pendapatnya Sitepu (2018), bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua macam, yaitu: a) Konvensional, adalah pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif; b) Non-konvensional, antara lain adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), dan perang gerilya dan revolusi. Berdasarkan bentuk partisipasi politik tersebut, maka bentuk partisipasi politik seseorang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, konvensional dan nonkonvensional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang, Pertama, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang

terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah (Surbakti, 2017) Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi antara lain menurut Lane dalam Efriza (2018) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu

Bahwa partisipasi politik memiliki fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam memberikan dukungan ataupun koreksi terhadap kinerja pemerintah serta untuk memenuhi hak politik setiap individu. Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dalam Maran (2016) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, antara lain:

- b. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal.
- c. Faktor karakteristik pribadi seseorang; orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
- d. Faktor karakter sosial seseorang; hal ini menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang

politik.

- e. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri; lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitasaktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

2.5 Agen Sosialisasi Politik

Menurut Rush (2017) bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang, dan media massa. Proses sosialisasi melalui berbagai tahap sejak masa kanak-kanak sampai tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Hal ini berlangsung dalam proses yang berkesinambungan sepanjang hidup. Sementara itu, Apter (2018) mengklasifikasikan agen-agen sosialisasi politik tetapi secara eksplisit dengan membaginya berdasarkan tahapan sosialisasi, yaitu: fase pertama adalah proses belajar dalam keluarga dalam artian bahwa orang-orang dewasa adalah warga negara yang mengutarakan sikap mengenai masyarakat atau kebencian mereka terhadap pemimpin- pemimpin politik dan pimpinan-pimpinan partai, dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka.

Fase kedua ketika sang anak beranjak dewasa dan menghadapi situasi-situasi kelompok di luar keluarga, proses ini terjadi di sekolah dan rekan sebaya. Fase ketiga merupakan tahapan ketika dewasa yang terjadi dalam lingkup pekerjaan, kelompok agama, partai politik dan kelompok perkumpulan. Agen-agen sosialisasi politik menurut Efriza (2016) terdiri dari 6 jenis, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Jika diasumsikan usia pemilih pemula yaitu 17-21 tahun maka status pemilih pemula juga bisa terdiri dari 24 mahasiswa ataupun pekerja muda sehingga agen sosialisasinya termasuk kampus atau tempat kerja.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi politik

serta pendapat para ahli yang menjelaskannya:

a. Keluarga

Fase awal pembelajaran seorang anak dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar dalam keluarga sebelum anak sadar mengenai politik. Hal-hal seperti itu dirasakan oleh anak-anak jauh sebelum mereka memahaminya. Keluarga mempunyai peranan yang menentukan dalam proses sosialisasi nilai politik terhadap warga negara ataupun individu karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan nilai-nilai politiknya kepada seseorang individu justru pada saat masa kanak-kanak\

b. Sekolah

Pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak dididik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik. Kesempatan berpartisipasi di sekolah nampaknya mempunyai pengaruh yang jelas terhadap kedudukan seseorang di dalam skala kompetensi subyektif. Kompetensi politik subyektif yakni kepercayaan mereka bahwa mereka mampu mempengaruhi pemerintah. Sekolah membuat usaha sadar untuk mengalihkan pengetahuan dan nilai-nilai politik. Sekolah tampaknya merupakan suatu lembaga paling efektif bila ia menguatkan orientasi si anak daripada bila ia mencoba mengalihkan nilai-nilai baru. Tingkat pendidikan di sini juga termasuk pendidikan di perguruan tinggi atau kampus saat sang anak menjadi mahasiswa. Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya

c. Tempat kerja

Faktor penting yang menentukan adalah kesempatan berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja seseorang. Struktur kekuasaan di tempat kerja mungkin menjadi faktor yang paling penting dan jelas strukturnya dimana setiap orang mendapati dirinya dalam kontak sehari-hari. Pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun informal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh dan semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.

d. Kelompok teman sebaya

Pada prosesnya, ketika anak-anak itu muncul dari pengaruh awal keluarganya masuk ke dalam dunia yang lebih besar dari sekolah dan kelompok-kelompok sebaya, maka mereka terkena pengaruh-pengaruh lain yang dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan politisasi awalnya. Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung

e. Media massa

Media mempunyai dampak terhadap orientasi politik tertentu seperti peran yang kita harapkan dari pejabat pemerintah. Diketahui bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik. Di dalam suatu masyarakat yang sifatnya terkungkung atau dimana rezim berkuasa secara totaliter, dengan sendirinya, tidak banyak nilai-nilai politik yang bisa diturunkan. Tetapi dalam suatu masyarakat yang demokratis, nilai-nilai politik yang dikandung media massa sangat bervariasi. Media massa dalam hal ini, baik 28 media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media online, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang”.

f. Kontak-kontak politik langsung

Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya. Organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai peranan pula menyalurkan nilai-nilai politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui berperannya pola aliran politik dalam organisasi-organisasi maka secara langsung anggota-anggota suatu organisasi kemasyarakatan terlibat atau mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menurunkan atau menyebarkan nilai-nilai politik ke dalam organisasi tersebut maupun kepada anggota masyarakat yang bukan anggota dari organisasi-organisasi tersebut

Berdasarkan penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi di atas, maka yang dimaksud dengan agen sosialisasi dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu mengenai pemilih pemula adalah agen-agen sosialisasi yang terdiri dari keluarga, sekolah/kampus/tempat kerja, teman, media massa baik cetak maupun elektronik serta situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung

2.6 Peran Sekolah sebagai Agen Sosialisasi Politik

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan sikap politik siswa. Menurut McCarthy dan Zald (2018), sekolah dapat menjadi agen sosialisasi yang mempengaruhi pembentukan pandangan politik seseorang, baik secara langsung melalui pengajaran yang terstruktur, maupun secara tidak langsung melalui interaksi sosial di lingkungan sekolah. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan mengenai politik, demokrasi, hak asasi manusia, serta cara-cara berpartisipasi dalam politik. Selain itu, berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, seperti debat, forum diskusi, atau kegiatan politik lainnya, dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengasah keterampilan berpikir kritis mereka terhadap berbagai isu politik yang berkembang di masyarakat.

Di Sekolah, peran sekolah sebagai agen sosialisasi politik sangat penting dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu-isu politik lokal maupun nasional. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan yang mendorong pemikiran analitis dan kritis, sekolah membantu mereka memahami bagaimana cara mengkritisi kebijakan publik dan mengaplikasikan pemahaman politik dalam kehidupan sehari-hari.

Friza (2017), peran sekolah dalam sosialisasi politik terdiri dari

1. Penyampaian Pengetahuan: Sekolah memberikan pengetahuan tentang sistem politik, struktur pemerintahan, dan proses demokrasi.
2. Pembentukan Sikap: Sekolah membentuk sikap dan nilai politik siswa melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial di sekolah.
3. Pengembangan Keterampilan: Sekolah mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti berpikir kritis, berbicara di depan umum, dan berdebat.
4. Peningkatan Partisipasi: Sekolah dapat mendorong peningkatan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula, dengan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dalam Maran (2017) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, antara lain:

- a. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal.
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang; orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
- c. Faktor karakter sosial seseorang; hal ini menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan

menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

- d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri; lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitasaktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Sekolah sebagai agen perubahan sosialisasi politik, memegang peranan penting. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan. Faktor Kontekstual seperti perbedaan metode belajar, akses terhadap institusi seperti parpol, kelompok sosial, dan komunitas online, dan tingkat intensitas eksposisi dari kaum muda terhadap pembicaraan dan aktivitas orang dewasa mempengaruhi sosialisasi (Sapiro :2014).

Penelitian yang dilakukan mendapatkan bahwa siswa yang tinggal dalam wilayah yang berbeda memiliki pengalaman dan orientasi politik berdasarkan komunitas lokal mereka bahkan ketika variabel demografi dan SES diperhitungkan. Siswa yang terisolasi dalam lingkungan pendidikan yang terpisah kurang berhubungan dengan budaya utama sangat mungkin untuk tidak mengembangkan norma-norma partisipasi politik (Ellen et al., 2012). Individu dapat mengembangkan pandangan-pandangan mereka berdasarkan nilai-nilai bersama masyarakat ketika keanggotaan tidak berdasarkan identitas etnik tapi kebutuhan dan kelemahan bersama (Williams, 2013).

Isu-isu seputar lingkungan, global warming, pangan dan pertanian, intervensi militer, kemiskinan, rasisme, telah membawa orang untuk menganggap masa depan mereka bertautan dengan orang-orang di luar negeri atau budaya

mereka. Berkaitan dengan hal ini Sapiro melihat perlunya peneliti untuk mencermati lembaga supranational dalam sosialisasi warga dunia (2014). Bersamaan dengan itu cara melakukan studi terhadap agen sosialisasi politik juga harus diperhatikan. Sejauh mana siswa dipisahkan dari aktivitas orang dewasa yang berhubungan dengan politik mempengaruhi keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan dewasa mereka nantinya. Dengan demikian disamping simulasi kehidupan politik, pengalaman pembelajaran dalam kehidupan yang nyata dalam aktivitas sosial dan politik penting untuk membentuk pengalaman politik yang bermakna

Pandangan ini mendapatkan gugatan dari banyak ahli yang melakukan penelitian di bidang sosialisasi politik akhir-akhir ini. Peran sekolah dalam proses pembelajaran politik sangat penting, terutama dalam peningkatan pengetahuan politik siswa (Goulet, 2008). Pengalaman pembelajaran di sekolah memiliki dampak terhadap perilaku mereka setelah dewasa. Norma-norma kewarganegaraan yang telah mereka dapatkan ketika sekolah memiliki efek yang panjang, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik.

2.7 Sikap Kritis

Belajar berpikir kritis artinya belajar mengenai bagaimana cara berpikir itu sendiri. Di mana kita menanggapi semua masalah dilihat dari sisi baik atau buruknya, sehingga kita dapat membuat kesimpulan atau keputusan dengan tepat. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang dapat diterima secara bijak. Oleh karena itu, seseorang dapat mengambil keputusan yang bijak dalam memecahkan masalah (Nuroton, 2023)

Sikap kritis dalam politik adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan kebijakan serta keputusan politik yang ada dengan cara yang objektif dan rasional. Pembentukan sikap kritis ini sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat demokratis, karena akan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses politik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. (Farikiansyah, 2024).

Dalam konteks sekolah, pembentukan sikap kritis ini dapat dimulai dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori politik, hak-hak politik, serta cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan pendapat politik secara konstruktif. Dengan demikian, sekolah tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan dasar mengenai politik, tetapi juga membentuk kemampuan siswa untuk berfikir secara kritis dan menganalisis informasi yang mereka terima.

Menurut Fister (2016) mengemukakan bahwa berpikir kritis berarti pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk bernalar. Siswa dapat mengetes kemampuan berdasarkan pengalamannya, mengemukakan ide dan sebelum melakukan pembenaran siswa harus mempertimbangkan argumennya. Menurut pendapat Tuanakota (2017) berpikir kritis ialah proses mengaplikasikan, menelaah, menyintersiskan, dan mempertimbangkan informasi yang didapatkan. Berpikir kritis melalui observasi dan pengalaman, merupakan acuan terkait tindakan yang telah diambil.

Menurut Noris dan Ennis (2019) bahwa berpikir kritis merupakan mempunyai pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang dipusatkan pada pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan atau diyakini. Jika masuk akal berarti berpikir berdasarkan atas kenyataan atau bukti yang rasional untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, reflektif memiliki arti mencari dengan sadar dan tegas kemungkinan solusi yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam berpikir yang difokuskan pada pengambilan keputusan terbaik melalui observasi, pengalaman, maupun refleksi dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan bukti yang rasional untuk meningkatkan kualitas berpikir.

Menurut Ennis (2017) mengungkapkan indikator dalam berpikir kritis digolongkan menjadi lima, yaitu:

1. menyampaikan penjelasan sederhana yang meliputi: memusatkan pertanyaan, mengeluarkan argument, bertanya dan menjawab pertanyaan terkait penjelasan;
2. mendirikan keterampilan dasar yang meliputi: mempertimbangkan

reliabilitas suatu sumber, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi;

3. meringkas, yang meliputi: melakukan kesimpulan dan meninjau hasil kesimpulan, dan memikirkan hasilnya;
4. memberikan penjelasan lanjut, yang meliputi: mendefinisikan arti dan mempertimbangkan istilah, mengenali hipotesis; dan e. mengukur rencana dan teknik, yang meliputi: menentukan sebuah tindakan, berhubungan dengan orang lain.

Menurut Purwati, dkk (2016) indikator yang digunakan dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut.

1. Interpretasi, yaitu mengetahui permasalahan yang akan ditunjukkan dengan menulis apa yang diketahui maupun yang telah ditanyakan soal dengan tepat.
2. Kajian, yaitu menjelaskan keterkaitan antara penjelasan, pertanyaan, rancangan yang telah diberikan dalam soal dengan melakukan model dan penjelasan yang benar.
3. Evaluasi, yaitu melakukan prosedur perhitungan yang benar dalam mengerjakan soal dengan lengkap dan benar.
4. Inferensi, yaitu dapat menarik kesimpulan dari apa yang ditanyakan dengan tepat.

Di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, proses pembentukan sikap kritis siswa dapat dilihat melalui metode pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok, simulasi pemilu, dan kegiatan lain yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam isu-isu politik yang relevan. Pembelajaran yang berfokus pada penerapan teori politik dalam konteks nyata ini akan meningkatkan kesadaran politik siswa dan membantu mereka mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai fenomena politik yang ada.

2.8 Kemampuan Bersikap Kritis

Menurut Paul & Elder (2016), Kemampuan berpikir kritis merupakan cara bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistematis cara berpikir dan menghasilkan daya pikir

intelektual dalam ide-ide yang digagas. Seseorang yang berpikir secara kritis akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penting dengan baik. Dia akan berpikir secara jelas dan tepat. Selain itu, dapat menggunakan ide yang abstrak untuk bisa membuat model penyelesaian masalah secara efektif.

Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari pemikir kritis itu sendiri adalah:

- a. Mampu membuat simpulan dan solusi yang akurat, jelas, dan relevan terhadap kondisi yang ada.
- b. Berpikir terbuka dengan sistematis dan mempunyai asumsi, implikasi, dan konsekuensi yang logis.
- c. Berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar dalam proses berpikir kritis ini adalah kejelasan (clarity), tingkat akurasi (accuracy), tingkat kepresisian (precision) relevansi (relevance), logika berpikir yang digunakan (logic), keluasan sudut pandang (breadth), kedalaman berpikir (depth), kejujuran (honesty), kelengkapan informasi (information), dan bagaimana implikasi dari solusi yang dikemukakan (implication).

Kriteria-kriteria di atas tentunya harus menggunakan elemen-elemen penyusun kerangka berpikir suatu gagasan atau ide. Sebuah gagasan/ide harus menjawab beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari sebuah gagasan/ide,
2. Pertanyaan dari suatu masalah terhadap gagasan/ide,
3. Sudut pandang dari gagasan/ide,
4. Informasi yang muncul dari gagasan/ide,
5. Interpretasi dan kesimpulan yang mungkin muncul,
6. Konsep pemikiran dari gagasan/ide tersebut,
7. Implikasi dan konsekuensi,
8. Asumsi yang digunakan dalam memunculkan gagasan/ide tersebut.

Dasar-dasar ini yang pada prinsipnya perlu dikembangkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis adalah bagaimana menyeimbangkan aspek-aspek pemikiran yang ada di atas menjadi sesuatu yang sistematis dan mempunyai dasar atau nilai ilmiah yang kuat. Selain itu, juga perlu memperhitungkan aspek alamiah yang terdapat dalam diri manusia karena hasil pemikiran kita tidak lepas dari hal-hal yang kita pikirkan. Secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan cara berpikir mengenai subjek, isi, dan masalah apapun, di mana manusia yang berpikir selalu meningkatkan dan memperbarui kualitas berpikirnya.

Upaya ini dilakukannya dengan berbagai analisis, penilaian, dan rekonstruksi yang terampil. Berpikir kritis artinya diarahkan, dikendalikan, diawasi oleh diri sendiri sekaligus merupakan koreksi terhadap diri sendiri. Semua hal tersebut dilakukan secara teliti karena dikendalikan oleh berbagai tolak ukur yang berasal dari pemikiran yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan menyelesaikan masalah yang dimiliki manusia, begitu juga komitmen untuk mengatasi egosentrisme dan sosiosentrisme yang menjadi sifat dasar manusia.

Dalam melakukan analisis, seseorang harus mampu mengidentifikasi (mengenali) tujuan dan mempertanyakan hal yang menjadi subjek analisisnya, begitu juga dengan berbagai informasi, asumsi, konsep utama, sudut pandang, dampak, dan kesimpulannya. Seseorang harus selalu memeriksa penilaian yang telah dilakukannya demi memperoleh penilaian yang jelas/jernih, tepat, teliti, dalam, luas, jujur (adil), bermanfaat, memiliki relevansi dengan segala hal yang ada dalam sebuah subjek atau masalah, dan sesuai dengan jalur pemikiran akal sehat manusia.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang atau khususnya siswa dapat berpikir kritis jika mempunyai dasar atau nilai ilmiah yang kuat dan mampu mengidentifikasi (mengenali) tujuan dan mempertanyakan hal yang menjadi subjek analisisnya, begitu juga dengan berbagai informasi, asumsi, konsep utama, sudut pandang, dampak, dan kesimpulannya. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis: Pada langkah pertama dari proses berpikir kritis,

seseorang mengevaluasi informasi atau data dengan alat interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Pada langkah kedua, pemikir kritis menerapkan berpikir kritis dan menjelaskan bagaimana cara mencapai kesimpulan-kesimpulannya dengan menyatakan hasilhasil, memutuskan prosedur-prosedur dan mempresentasikan argumenargumennya.

Akhirnya, pemikir kritis tersebut menjaring proses berpikirnya melalui pengujian diri dan koreksi diri. Berikut deskripsi dari keenam kecakapan tersebut dalam Filsaime (2018):

1. Interpretasi, yaitu kemampuan untuk memahami, menjelaskan dan memberi makna suatu data atau informasi
2. Analisis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan dari beberapa informasi yang dipergunakan untuk mengekspresikan pikiran atau pendapat
3. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menguji kebenaran dari informasi yang digunakan dalam mengekspresikan pemikiran
4. Inferensi, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan yang masuk akal
5. Eksplanasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran berdasarkan bukti, metodologi dan konteks
6. Regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur berpikirnya.

Dalam hal ini seseorang akan memeriksa ulang dan memperbaiki hasil berpikirnya sehingga menghasilkan kesimpulan/keputusan yang baik (Fawcett dalam Warda (2011:27), meneliti bahwa siswa yang berpikir kritis akan :

1. Memilih kata atau kalimat yang penting dan menanyakan kebenarannya
2. Membutuhkan bukti dukungan kesimpulan yang harus diterima
3. Menganalisis bukti dan memisahkan fakta dari asumsi-asumsi
4. Mengenal pernyataan asumsi yang diperlukan untuk membuat kesimpulan
5. Mengevaluasi asumsi-asumsi, untuk diterima atau ditolak
6. Mengevaluasi argumen, untuk menolak atau menerima kesimpulan
7. Memeriksa kembali asumsi-asumsi dengan keyakinan dan tindakan

2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap Kritis Siswa

Proses pembentukan sikap kritis siswa di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain (Naning, 2019) :

1. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana siswa mengembangkan pemahaman politik dan sikap kritis terhadap masalah politik. Kurikulum yang memuat mata pelajaran yang relevan dengan pengetahuan politik dan sosial akan memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam membentuk sikap kritis mereka.

2. Metode Pembelajaran

Penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif, seperti diskusi kelompok, debat, dan simulasi, dapat merangsang kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Metode pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka, mempertanyakan informasi yang diterima, serta melihat permasalahan dari berbagai perspektif.

3. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang mendukung dialog terbuka dan saling menghargai akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sikap kritis. Kehadiran guru sebagai fasilitator yang memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan sikap kritis.

4. Pengaruh Media Masa dan Teknologi

Pengaruh media massa, seperti televisi, surat kabar, dan internet, juga berperan dalam pembentukan sikap kritis siswa. Media ini dapat menjadi sumber informasi politik yang sangat besar, namun juga seringkali mengandung bias. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengajarkan siswa cara untuk menyaring informasi dari media dan mengkritisi apa yang mereka baca atau tonton.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap kritis siswa dapat

dibagi menjadi faktor internal dan eksternal (Mahmudi, 2010):

1. Faktor Internal

a. Kondisi Fisik dan Psikologis

Kondisi kesehatan fisik dan psikologis siswa dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan kritis. Siswa yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih mampu berkonsentrasi dan memproses informasi secara efektif.

b. Motivasi

Motivasi belajar siswa sangat penting dalam pembentukan sikap kritis. Siswa yang termotivasi untuk belajar akan lebih aktif dalam mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan mengevaluasi berbagai sudut pandang.

c. Kecemasan

Tingkat kecemasan yang tinggi dapat menghambat kemampuan berpikir kritis. Kecemasan dapat mengganggu konsentrasi dan membuat siswa cenderung menghindari situasi yang menantang.

d. Perkembangan Intelektual

Perkembangan kognitif siswa, termasuk kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah, merupakan faktor penting dalam membentuk sikap kritis.

e. Interaksi

Interaksi siswa dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan belajar sangat mempengaruhi pembentukan sikap kritis. Pengalaman berdiskusi, bertukar pendapat, dan belajar dari orang lain dapat memperluas wawasan dan mempertajam kemampuan berpikir kritis.

2. Faktor Eksternal:

a. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga yang mendukung dan mendorong siswa untuk berpikir kritis akan sangat berpengaruh. Keluarga yang memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi

berbagai ide akan membantu membentuk sikap kritis.

b. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang kondusif untuk berpikir kritis, seperti adanya kegiatan diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah, akan sangat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial akan membantu membentuk sikap kritis yang berwawasan luas.

d. Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi siswa, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, dapat membentuk sikap mereka. Pengalaman yang melibatkan emosi kuat akan cenderung lebih mudah membentuk sikap.

e. Latar Belakang Sosial Budaya

Latar belakang sosial budaya siswa juga mempengaruhi pembentukan sikap kritis. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh siswa akan membentuk cara pandang dan cara berpikir mereka.

f. Tradisi dan Budaya Sekolah:

Tradisi dan budaya sekolah yang menekankan pada pembelajaran aktif, diskusi, dan pemecahan masalah akan sangat mendukung pembentukan sikap kritis siswa.

Tips Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis

a. Berani Bertanya

Jangan ragu untuk bertanya kepada guru, teman, atau siapapun yang dianggap lebih tahu.

b. Membaca Buku dan Artikel

Memperbanyak membaca buku dan artikel dari berbagai sumber akan memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan.

c. Mencoba Hal Baru

Berani mencoba hal baru akan melatih siswa untuk keluar dari zona

nyaman dan menghadapi tantangan baru.

d. Berdiskusi dengan Orang Lain

Berdiskusi dengan orang lain akan membantu siswa dalam menguji pemikiran mereka dan mempertajam kemampuan berpikir kritis.

e. Berlatih Memecahkan Masalah

Memberikan latihan pemecahan masalah akan melatih siswa dalam menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang tepat.

2.10 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap politik siswa. Adapun penelitian terkait adalah sebagai berikut:

1. Billa, Berliana Dhea Shalsa. (2024) dengan judul Peran Grha Di Sma Negeri Bali Mandara Sebagai Agen Sosialisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Latar belakang Grha dibentuk sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri Bali Mandara (2) Model pembentukan karakter siswa dalam Grha di SMA Negeri Bali Mandara (3) Aspek-aspek Grha sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan karakter siswa yang berpotensi menjadi sumber belajar sosiologi di jenjang SMA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Latar belakang dibentuknya Grha karena faktor sosial budaya, politik, serta perlindungan dan keamanan. (2) Model pembentukan karakter yang dilakukan dalam Grha di SMA Negeri Bali Mandara yakni pembiasaan, keteladanan (roll model), dan pengawasan. Dengan model pembentukan karakter tersebut menumbuhkan 8 nilai karakter pada siswa yakni sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, mandiri, bersahabat/komunikatif, dan peduli lingkungan. (3) Aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai sumber

belajar pada jenjang SMA di antaranya adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan melatih pola pikir siswa dalam mempelajari proses sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Aspek afektif berkaitan dengan minat dan sikap siswa dalam mempelajari proses sosialisasi yang terjadi di Grha dan bagaimana model pembentukan karakter pada Grha. Aspek psikomotorik berkaitan dengan pengetahuan siswa mengenai proses sosialisasi di masyarakat khususnya di sekolah dengan mempelajari Grha di SMA Negeri Bali Mandara

2. Gulo, Iman Krisman Jaya (2024) dengan judul Peran Sekolah Sebagai Agen Sosalisasi Politik dalam Mendukung Pendidikan Politik Bagi Siswa di SMK Negeri 2 Mandrehe. Peran sekolah sebagai agen sosialisasi politik dalam mendukung pendidikan politik bagi siswa di SMK Negeri 2 Mandrehe yaitu sekolah berperan dalam memberikan pengetahuan politik kepada siswa agar siswa memiliki pemahaman tentang politik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi sekolah sebagai agen sosialisasi politik dalam mendukung pendidikan politik bagi siswa masih belum maksimal dilakukan di SMK Negeri 2 Mandrehe yaitu dapat dilakukan sekolah melalui pembelajaran PKn didalam kelas. Sekolah melaksanakan pendidikan politik utamanya dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti pemilihan ketua osis.
3. Rahman, Asmika (2017) dengan judul Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Pemula. Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilu dan demokrasi, keduanya tidak dapat dipisahkan, jika ada pemilu berarti di situ juga ada demokrasi. Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Pelibatan warga negara sebagai pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam pemilu, karena

sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula. Hal ini didasarkan bahwa kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Sekolah merupakan salah satu media atau sarana sosialisasi politik selain, partai politik, keluarga dan kelompok profesi, sehingga sekolah memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran sekolah sebagai sarana sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula. Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Sekolah sebagai salah satu sarana politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para generasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat madani (civil Society) dapat terlaksana dengan baik